



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Jend. A. Yani No. 01, Telanaipura, Jambi
Telp. (0741) 60144, Fax (0741) 60400, Website: www.jambiprov.go.id

BERITA ACARA

HASIL EPPD terhadap LPPD KABUPATEN BUNGO TAHUN 2024

Pada hari ini, Rabu tanggal Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, bertempat di Jambi telah disepakati hasil EPPD terhadap LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2024 yang dihadiri oleh:

A. Nama Tim Daerah

1. Sdr. Dr. H. Sudirman, S.H.,M.H. (Ketua Tim Daerah EPPD Provinsi Jambi tahun 2025 / Sekretaris Daerah Provinsi Jambi)
2. Sdr. Drs. Revo Anhar, M.Si (Wakil Penanggung Jawab)
3. Sdri. Juli Triarti, S.Pt (Pengendali Teknis)
4. Sdri. H. Dedi Dian Dwiwantoro, S.E (Ketua Tim)
5. Sdr. Riski Trialdakiva (Anggota)

B. Nama Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bungo

1. Donny Iskandar (Ketua Tim Penyusun LPPD Kabupaten Bungo tahun 2024/ Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Bungo)
2. Suryana Hendrawati, SE., ME. (Inspektur Kabupaten Bungo)
3. H. Deddy Irawan, SE., MM. (Kepala Bappeda Kabupaten Bungo)
4. S. Andi Sandri Alhabisy, S.STP.,ME. (Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo)

Dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Dasar Hukum Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebagai berikut :**
 - a) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b) PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - d) Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024;

- e) Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7/2946/OTDA tanggal 19 Mei 2025 kepada Gubernur Seluruh Indonesia tentang Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025;
- f) Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 503/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA/2025 Tanggal 17 Juni 2025 Perihal Pembentukan Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025;
- g) Surat Tugas Sekretaris Daerah Provinsi Jambi Nomor : 00.1.2.3/158/SPT/SETDA.PEM.OTDA/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 untuk melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi tahun 2025.

2. **Proses EPPD terhadap LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2024, sebagai berikut :**

- a) Pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Bungo dimulai tanggal 3,4,7,8 dan 9 Juli 2025;
- b) EPPD meliputi evaluasi kinerja makro dan evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, ruang lingkup EPPD meliputi:
 - Capaian kinerja makro dan capaian kinerja urusan pemerintahan;
 - Perbandingan kinerja dengan tahun sebelumnya;
 - Mengidentifikasi capaian urusan pemerintahan yang belum maksimal (faktor penghambat dan faktor pendukung).

Setelah berita acara ini disepakati dan ditandatangani, maka proses EPPD terhadap LPPD Kabupaten Bungo tahun 2024 melalui SILPPD telah dinyatakan selesai dan tidak ada lagi keraguan atas hasil evaluasi. Selanjutnya hasil evaluasi akan disusun dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang akan menjadi lampiran dalam Berita Acara ini, serta akan dipergunakan untuk pelaksanaan validasi dan evaluasi oleh Tim Nasional melalui Aplikasi SILPPD.

Demikian berita acara ini dibuat, untuk dapat dipertanggungjawabkan dalam pelaksanaan EPPD terhadap LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2024.

Bungo, Juli 2025

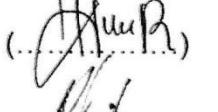
Ketua Tim Penyusun LPPD
Kabupaten Bungo,

Donny Iskandar



Sekretariat Penyusun LPPD

1. Esti Budi Wati, SE

.....
2. Asminar, S.IP

.....
3. Riza Fitra Hadi

.....
4. Dimas Fajar Dwi
Susanto, S.AB

.....

Anggota Tim Daerah LPPD

1. Drs. Revo Anhar, M.Si

.....
2. Juli Triarti, S.Pt

.....
3. H. Dedi Dwiwantoro, S.E

.....
4. Riski Trialdakiva

.....



**LAPORAN HASIL EVALUASI
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH TAHUN 2025
TERHADAP
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN BUNGO
TAHUN 2024**



**PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga dokumen Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 Kabupaten Bungo yang dilaksanakan pada pada tanggal 3 sampai dengan tanggal 9 Juli 2025 ini dapat disusun dengan baik.

Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yakni pasal 70 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah oleh Pemerintah Pusat. Amanat Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, bahwa LPPD digunakan sebagai dasar EPPD. Pasal 32 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Hasil EPPD yang dilakukan oleh Tim Nasional dilaporkan kepada Menteri berupa Laporan Hasil Evaluasi masing-masing pemerintah daerah provinsi.

Pelaksanaan EPPD di Kabupaten Bungo Tahun 2025 mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7/2947/OTDA tanggal 19 Mei 2025 Hal Penyampaian Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Provinsi, Kabupaten/Kota Tahun 2024. Evaluasi ini merupakan bagian dari upaya sistematis untuk menilai capaian kinerja pemerintahan daerah, baik dalam urusan pemerintahan yang bersifat makro maupun dalam urusan pemerintahan wajib dan pilihan yang menjadi kewenangan daerah. Pelaksanaan evaluasi bertujuan untuk memperoleh gambaran objektif mengenai keberhasilan, tantangan, serta perbaikan yang perlu dilakukan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Bungo Melalui proses evaluasi ini akan menghasilkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) yang diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang sejauh mana efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kualitas pelayanan publik telah tercapai, serta menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program pembangunan daerah ke depan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyusunan laporan ini, semoga dapat menjadi referensi yang bermanfaat dalam peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik di Kabupaten Bungo

Demikian laporan hasil evaluasi ini disampaikan, semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa meridhoi kita semua.

Jambi, 17 Juli 2025
Sekretaris Daerah Provinsi Jambi

selaku



DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Dasar Hukum Evaluasi	4
1.3. Maksud dan Tujuan Evaluasi	4
1.4. Kementerian/Lembaga Pelaksana Evaluasi	5
BAB II HASIL EVALUASI	4
2.1. Uraian Capaian Kinerja Makro	5
2.2. Uraian Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan	7
BAB III PENUTUP	
3.1. Saran dan Rekomendasi	51
3.2. Kesimpulan	52

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, serta diperjelas dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, Pemerintah Daerah memiliki kewajiban untuk menyusun dan menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) setiap tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Pemerintah Pusat atas pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

LPPD Kabupaten Bungo tahun 2024 menjadi instrumen penting dalam mendokumentasikan kemajuan pembangunan dan tata kelola pemerintahan yang telah dicapai selama satu tahun anggaran. Laporan ini memuat data dan informasi capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, termasuk pelaksanaan kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah (urusan wajib, urusan pilihan dan fungsi penunjang).

Sebagai tindak lanjut dari penyampaian LPPD tersebut, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dan Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) sebagai bagian dari mekanisme pembinaan dan pengawasan. Pelaksanaan EPPD Tahun 2025 terhadap LPPD Tahun 2024 dimaksudkan untuk menganalisis dan menginterpretasikan sejauh mana kinerja Pemerintah Kabupaten Bungo telah berhasil menjalankan fungsinya dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan daerah.

Evaluasi ini tidak hanya penting untuk mengukur kinerja, tetapi juga untuk memberikan umpan balik konstruktif bagi peningkatan efektivitas pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Selain itu, hasil EPPD dapat dijadikan sebagai dasar dalam perumusan kebijakan, penyusunan program peningkatan kapasitas daerah, penetapan program strategis dan langkah-langkah pembinaan lainnya, serta pertimbangan pemberian penghargaan oleh Pemerintah Pusat.

Dengan demikian, pelaksanaan EPPD Tahun 2025 terhadap LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2024 merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memperkuat akuntabilitas dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) serta peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerah, maka perlu disusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) sebagai gambaran kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Bungo.

1.2. Dasar Hukum Evaluasi

Dasar hukum pelaksanaan EPPD Tahun 2025 terhadap LPPD Kabupaten Bungo Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor: 100.2.2.7/10582/OTDA tanggal 24 Desember 2024 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia tentang Penyampaian Pedoman Penyusunan LPPD Tahun 2024;
- e. Surat Edaran Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor : 100.2.1.7/2947/OTDA tanggal 19 Mei 2025 kepada Tim Nasional tentang Penyampaian Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2025;
- f. Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 503/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA/2025 tanggal 17 Juni 2025 tentang Pembentukan Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025; dan
- g. Surat Perintah Tugas Sekretaris Daerah atas nama Gubernur Jambi Nomor: 00.1.2.3/158/SPT/SETDA.PEM.OTDA/VI/2025 tanggal 26 Juni 2025 untuk Melakukan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten/Kota Se-Provinsi Jambi Tahun 2025.

1.3. Maksud dan Tujuan Evaluasi

Bagian ini menjelaskan alasan utama mengapa evaluasi dilakukan serta menjelaskan apa yang ingin dicapai dari evaluasi tersebut.

1.3.1 Maksud

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) terhadap laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) Kabupaten dan Kota dimaksudkan untuk menilai dan menganalisis kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam kerangka pelaksanaan otonomi daerah dengan menggunakan SILPPD.

1.3.2 Tujuan

Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah (EPPD) bertujuan untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, dan juga untuk memberikan umpan balik (*feed back*) yang konstruktif dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai tujuan otonomi daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan publik, dan daya saing daerah.

1.4. Perangkat Daerah Pelaksana Evaluasi

Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Jambi Nomor 503/KEP.GUB/SETDA.PEM.OTDA/2025 tentang Pembentukan Tim Daerah Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025, perangkat Daerah pelaksana Evaluasi adalah sebagai berikut :

1. Sekretariat Daerah Provinsi Jambi
(Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Jambi);
2. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Provinsi Jambi;
3. Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi;
4. Inspektorat Daerah Provinsi Jambi;
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;
6. Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi.

BAB II

HASIL EVALUASI

Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Bungo Tahun 2025 atas Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1.1. Uraian Capaian Kinerja Makro

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
 - a. Capaian kinerja tahun lalu : 71,06%
 - b. Capaian kinerja tahun berkenaan : 71,92%
 - c. Laju capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 1,21%
IPM Kabupaten Bungo telah menunjukkan tren peningkatan yang berkelanjutan mencapai angka 71,92% pada Tahun 2024, yang menandakan pertumbuhan sebesar 1,21% dari tahun sebelumnya.
2. Angka Kemiskinan
 - a. Capaian kinerja tahun lalu : 5,290%
 - b. Capaian kinerja tahun berkenaan : 5,06%
 - c. Laju capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 4.348%
 - d. Laju capaian kinerja angka kemiskinan mengalami penurunan sebesar -4,348%.
Angka kemiskinan pada Kabupaten Bungo menunjukkan penurunan mencapai angka 5,06% dari tahun 2023 dimana angka kemiskinan mencapai 5,06.
3. Angka Pengangguran
 - a. Capaian kinerja tahun lalu : 5,23%
 - b. Capaian kinerja tahun berkenaan : 4,67%
 - c. Laju capaian kinerja mengalami penurunan sebesar -10,707%
 - d. Laju capaian kinerja angka pengangguran mengalami penurunan sebesar 10,707%. Angka pengangguran di Kabupaten Bungo telah menunjukkan penurunan yang mencapai angka 4,67% pada Tahun 2024, yang menandakan bahwa terjadi penurunan sebesar 10,707% dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 5,23%
4. Pertumbuhan Ekonomi
 - a. Capaian kinerja tahun lalu : 4,69%
 - b. Capaian kinerja tahun berkenaan : 3,30 %
 - c. Laju capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 29.638%
 - d. Laju capaian kinerja pada Indikator Pertumbuhan Ekonomi mengalami penurunan sebesar 29,638%. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bungo menunjukkan penurunan mencapai angka 3,3% pada tahun 2023 dimana Pertumbuhan Ekonomi sebesar 4,69%
5. Pendapatan/Pengeluaran Per Kapita
 - a. Capaian kinerja tahun lalu : 14.377,22
 - b. Capaian kinerja tahun berkenaan : 14.851,30
 - c. Laju capaian kinerja mengalami peningkatan sebesar 3.297%

d. Laju capaian kinerja mengalami peningkatan 3,297% berdasarkan data BPS Kabupaten Bungo Pengeluaran per kapita per tahun menunjukkan peningkatan dari 14.377,22 tahun 2023 menjadi 14.851,30 tahun 2024 yang menandakan bahwa terjadi peningkatan Pengeluaran per kapita per tahun sebesar 3,297%.

6. Ketimpangan Pendapatan

- a. Capaian kinerja tahun lalu : 0,283
- b. Capaian kinerja tahun berkenan : 0,266
- c. Laju capaian kinerja mengalami penurunan sebesar 6.007%
- d. Laju capaian kinerja mengalami penurunan 6,007 berdasarkan data BPS Kabupaten Bungo Ketimpangan pengeluaran menunjukkan penurunan dari 0,283% tahun 2023 menjadi 0,266% tahun 2024 yang menandakan bahwa terjadi penurunan ketimpangan pengeluaran sebesar 6,007%

1.2. Uraian Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

1.2.1. Urusan Pemerintahan Wajib Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pendidikan

- a. Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 82,408%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 84,068%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1,66 persen tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> peningkatan Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD tersebut karena adanya penurunan jumlah anak usia 5-6 tahun Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 14.467 anak pada tahun 2023 menjadi 14.424 anak pada tahun 2024 namun tidak signifikan yaitu hanya 43 anak. Penurunan jumlah anak tersebut tidak diikuti dengan peningkatan jumlah anak usia 5-6 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan PAUD dimana pada tahun 2023 sebanyak 11.922 anak dan mengalami kenaikan menjadi 12.126 anak pada tahun 2024.
- b. Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Dasar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 87,492%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 95,232%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,74 persen dari tahun sebelumnya.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan dasar tersebut karena adanya kenaikan jumlah anak usia 7-12 tahun Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 43.839 anak pada tahun 2023 menjadi 44.110 anak pada tahun 2024. Kenaikan jumlah anak tersebut diikuti dengan peningkatan jumlah anak usia 7-12 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan dasar dimana pada tahun 2023 sebanyak 38.356 anak dan mengalami kenaikan menjadi 42.007 anak pada tahun 2024.
- c. Mengukur tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan Menengah Pertama
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 81,853 %
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 75,392%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 6,46 persen dari tahun sebelumnya
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam Pendidikan menengah pertama tersebut karena adanya kenaikan jumlah anak usia 13-15 tahun Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 21.585 anak pada tahun 2023 menjadi 21.924 anak pada tahun 2024. Kenaikan jumlah anak tersebut tidak diikuti dengan penurunan jumlah anak usia 13-15 tahun yang sudah tamat atau sedang belajar di satuan Pendidikan menengah pertama dimana pada tahun 2023 sebanyak 17.668 anak dan mengalami penurunan menjadi 16.529 anak pada tahun 2024.
- d. Mengukur Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam Pendidikan kesetaraan
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 21,433%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 43,391%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara (anak) usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 21,96 persen dari tahun sebelumnya.
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Tingkat partisipasi warga negara (anak) usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan tersebut karena adanya penurunan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah pada Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 12.275 anak pada tahun 2023 menjadi 4.872 anak pada

tahun 2024. Penurunan jumlah anak tersebut diikuti dengan penurunan jumlah anak usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang sudah tamat atau sedang belajar di pendidikan kesetaraan dimana pada tahun 2023 sebanyak 2.631 anak dan mengalami penurunan menjadi 2.114 anak pada tahun 2024.

2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kesehatan

- a. Rasio daya tampung rumah sakit rujukan
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 1,375 %
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 1,421%
 - 3) Capaian kinerja Rasio daya tampung rumah sakit rujukan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,046 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Rasio daya tampung rumah sakit rujukan tersebut karena adanya kenaikan jumlah keseluruhan tempat tidur pada rumah sakit rujukan Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 514 tempat tidur pada tahun 2023 menjadi 540 tempat tidur pada tahun 2024. Kenaikan jumlah tempat tidur tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah penduduk di Kabupaten Bungo dimana pada tahun 2023 sebanyak 373.583 penduduk dan mengalami penurunan menjadi 380.027 penduduk pada tahun 2024.
- b. Persentase RS Rujukan Tingkat Kab/Kota yang terakreditasi
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 66,67%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 66,67%
 - 3) Capaian kinerja Persentase rumah sakit rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja atas jumlah rumah sakit rujukan yang terakreditasi tidak mengalami kenaikan maupun penurunan karena dari total jumlah rumah sakit di kabupaten bungo yaitu sebanyak 6 rumah sakit, 4 di antaranya telah terakreditasi paripurna yang masih berlaku hingga 2026-2027, sedangkan 2 rumah sakit lainnya yaitu RSUD Kuamang Kuning dan RS Rantau Ikil Kabupaten Bungo sedang dalam proses akreditasi.
- c. Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 73,67%
 - 3) Capaian kinerja Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan Kesehatan ibu hamil mengalami penurunan sebesar 26,33% dari tahun sebelumnya.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Dokumen pendukung atas capaian kinerja tahun 2024 yang memuat rincian seluruh ibu hamil yang mendapatkan pelayanan kesehatan pada setiap rumah sakit/puskesmas tidak ada sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat diuji nilai capaiannya.
- d. Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 76%
 - 3) Capaian kinerja Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 24 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan tersebut karena adanya penurunan jumlah ibu bersalin pada Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 7.447 ibu bersalin pada tahun 2023 menjadi 7.070 ibu bersalin pada tahun 2024. Penurunan jumlah ibu bersalin tersebut diikuti dengan penurunan jumlah ibu yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 7.447 ibu bersalin dan mengalami penurunan menjadi 5.373 ibu bersalin pada tahun 2024.
- e. Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan Kesehatan bayi baru lahir
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah tercapai sebesar 100 persen.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir telah tercapai 100 persen karena adanya peningkatan jumlah bayi baru lahir di Kabupaten Bungo dan jumlah bayi baru lahir yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 7.165 bayi pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebanyak 7.446 bayi pada tahun 2024.
- f. Cakupan pelayanan Kesehatan balita sesuai standar
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 79,93%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 87,24%
 - 3) Capaian kinerja Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 7,31 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar tersebut karena adanya

penurunan jumlah balita di Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 29.234 balita pada tahun 2023 menjadi 26.688 balita pada tahun 2024. Penurunan jumlah balita tersebut diikuti dengan penurunan jumlah balita yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 23.367 balita dan mengalami penurunan menjadi 23.283 balita pada tahun 2024.

- g. Persentase anak usia Pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 95,72%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 29,03%
 - 3) Capaian kinerja Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 66,69 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tersebut karena adanya kenaikan jumlah anak usia pendidikan dasar di Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 12.466 anak pada tahun 2023 menjadi 66.034 anak pada tahun 2024. Kenaikan jumlah anak usia pendidikan dasar tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 11.933 anak dan mengalami kenaikan menjadi 19.170 anak pada tahun 2024.
- h. Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 87,15%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 86,40%
 - 3) Capaian kinerja Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,75 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tersebut karena adanya kenaikan jumlah orang usia 15-59 tahun di Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 246.709 orang pada tahun 2023 menjadi 247.282 orang pada tahun 2024. Kenaikan jumlah orang usia 15-59 tahun tersebut tidak diikuti dengan jumlah orang usia 15-59 tahun yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 215.007 orang dan mengalami kenaikan menjadi 213.662 pada tahun 2024.

- i. Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining Kesehatan sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 93%
 - 3) Capaian kinerja Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 7% dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar tersebut karena adanya penurunan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas di Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 39.213 orang pada tahun 2023 menjadi 30.274 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah warga negara usia 60 tahun ke atas tersebut diikuti dengan jumlah warga negara 60 tahun ke atas yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 39.213 orang dan mengalami penurunan menjadi 28.155 orang pada tahun 2024.
- j. Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan Kesehatan sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 38,47%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 61,53 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tersebut karena adanya penurunan jumlah penderita hipertensi di Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 76.773 orang pada tahun 2023 menjadi 17.756 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah penderita hipertensi tersebut diikuti dengan jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 29.541 orang dan mengalami penurunan menjadi 17.756 orang pada tahun 2024.
- k. Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 86,56%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 13,44 persen dari tahun sebelumnya.

4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Persentase penderita Diabetes Melitus (DM) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar tersebut karena adanya penurunan jumlah penderita DM di Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 2.814 orang pada tahun 2023 menjadi 2.278 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah penderita DM tersebut diikuti dengan penurunan jumlah penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 2.436 orang dan mengalami penurunan menjadi 2.278 orang pada tahun 2024

- I. Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar tahun 2024 telah tercapai 100 persen
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar telah tercapai 100 persen karena adanya peningkatan jumlah ODGJ berat di Kabupaten Bungo dan jumlah penderita ODGJ yang mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 514 orang pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebanyak 531 orang pada tahun 2024.
- m. Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar tahun 2024 telah tercapai 100%.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Persentase orang terduga TBC yang mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar telah tercapai 100% karena adanya peningkatan jumlah penderita TBC di Kabupaten Bungo dan jumlah penderita TBC yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sebanyak 580 orang pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebanyak 2.655 orang pada tahun 2024.
- n. Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 69,87%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%

- 3) Capaian kinerja Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 30,13 persen dari tahun sebelumnya.
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar tersebut karena adanya penurunan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV di Kabupaten Bungo yaitu sebanyak 7.808 orang pada tahun 2023 menjadi 167 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV tersebut diikuti dengan penurunan jumlah orang dengan resiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar pada tahun 2023 sebanyak 5.456 orang dan mengalami penurunan menjadi 167 orang pada tahun 2024.

3. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

- a. Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 4,46%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 4,46%
 - 3) Capaian kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota tahun 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota bersifat konstan (tetap) karena tidak terjadi perubahan pada luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota yaitu seluas 501.99 ha dan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota seluas 22.42 ha.
- b. Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai di WS Kewenangan Kab/Kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 4,46%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 4,46%
 - 3) Capaian kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota tahun 2024 tidak mengalami kenaikan maupun penurunan dari tahun sebelumnya.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota bersifat konstan (tetap) karena tidak terjadi perubahan pada luas kawasan permukiman rawan banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota yaitu seluas 501.99 ha dan luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di Wilayah Sungai Kewenangan Kab/Kota seluas 22.42 ha.
- c. Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi
- 1) Capaian kinerja tahun lalu :58,18%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 57,97 %
 - 3) Capaian kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,21 dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi dikarenakan kenaikan luas daerah irigasi kewenangan Kabupaten Bungo pada tahun 2023 yaitu seluas 2.840,84 ha menjadi 2.850,98 ha pada tahun 2024. Kenaikan luas daerah irigasi tersebut tidak diikuti luas irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi yang dibangun (ha), ditingkatkan (ha), direhabilitasi (ha), dioperasi dan pelihara (ha) di tahun 2024 bersifat konstan (tetap) seluas 1.652,82 ha.
- d. Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 78,20%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 55,97%
 - 3) Capaian kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 22,05 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga dikarenakan penurunan jumlah total proyeksi rumah tangga Kabupaten Bungo pada tahun 2023 yaitu sebanyak 373.583 rumah tangga menjadi 93.471 rumah tangga pada tahun 2024. Penurunan jumlah total proyeksi rumah tangga tersebut diikuti jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum

melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 291.477 rumah tangga menjadi 52.316 rumah tangga pada tahun 2024.

- e. Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 81,12%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 81,28%
 - 3) Capaian kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,16 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik dikarenakan kenaikan Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 86.460 rumah tangga menjadi 86.632 rumah tangga pada tahun 2024.
- f. Rasio kepatuhan IMB kab/ kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Dokumen pendukung jumlah persetujuan Bangunan Gedung yang berlaku pada Kabupaten Bungo tahun 2024 tidak ada sehingga tidak dapat diuji nilai capaiannya.
- g. Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 63,75%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 64,75%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat Kemantapan Jalan kabupaten/kota tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 1 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Tingkat Kemantapan Jalan di Kabupaten Bungo dikarenakan kenaikan Jumlah panjang jalan dalam kondisi mantap di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 511.44 km menjadi 519.44 km pada tahun 2024.
- h. Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 62,5%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%

- 3) Capaian kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 37,5 dari tahun sebelumnya.
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi di Kabupaten Bungo dikarenakan penurunan Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 24 orang menjadi 8 orang pada tahun 2024. Penurunan Jumlah kebutuhan tenaga operator dan teknis/analisis di wilayah Kabupaten Bungo diikuti Jumlah tenaga kerja konstruksi yang terlatih di wilayah kabu/kota yang dibuktikan dengan sertifikat pelatihan operator dan teknis/analisis di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 15 orang menjadi 8 orang pada tahun 2024.
 - i. Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi tahun 2024 sesuai standar mencapai 100.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi sesuai standar telah tercapai 100 karena adanya peningkatan Jumlah total proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya dan Jumlah proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa terjadi kecelakaan konstruksi sebanyak 21 unit/paket pada tahun 2023 dan mengalami peningkatan sebanyak 51 unit/paket pada tahun 2024.

4. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana pada Kabupaten Bungo telah tercapai 100% karena adanya peningkatan jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 1 unit rumah menjadi 22 unit rumah pada tahun 2024. Kenaikan ini juga diikuti oleh jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 0 unit rumah menjadi 22 unit rumah pada tahun 2024.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Perhitungan IKK Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota sesuai rumus yaitu jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 dibagi jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani tahun 2024. Namun, berdasarkan bukti pendukung (dokumen) yang dilampirkan Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun 2024 dan Jumlah total rencana unit rumah korban bencana yang akan ditangani pada tahun 2024 seharusnya sebanyak 21 unit rumah.
- b. Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 5%
 - 3) Capaian kinerja Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 5 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota karena adanya peningkatan jumlah total rumah tangga terkena relokasi program Pemerintah Daerah yang memenuhi kriteria penerima pelayanan pada tahun 2023 sebanyak 1 unit rumah menjadi 20 unit rumah pada tahun 2024. Kenaikan ini juga diikuti oleh Rumah Tangga Penerima Fasilitasi Penggantian Hak Atas Pengusahaan Tanah dan/atau Bangunan + Rumah Tangga Penerima Subsidi Uang Sewa + Rumah Tangga Penerima Penyediaan Rumah Layak Huni pada tahun 2023 sebanyak 0 unit rumah menjadi 1 unit rumah pada tahun 2024.
- c. Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 96,22%
 - 3) Capaian kinerja Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 3,78 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kab/ kota yang ditangani karena adanya penurunan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha pada tahun 2023 sebanyak 1,06 ha menjadi 137,8 ha pada tahun 2024. Penurunan ini tidak diikuti oleh kenaikan luas kawasan permukiman kumuh dibawah 10

ha yang ditangani pada tahun 2023 sebanyak 1,06 ha menjadi 132 ha pada tahun 2024.

- d. Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 6,69%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 6,65%
 - 3) Capaian kinerja Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,04 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kabupaten Bungo karena adanya penurunan jumlah unit rumah tidak layak huni pada tahun 2023 sebanyak 7.134 rumah menjadi 7.094 rumah pada tahun 2024.
- e. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,39%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Perhitungan IKK pada penyebut yaitu Jumlah unit rumah kab/kota tahun 2024 tidak sesuai rumus seharusnya nilai diambil dari keseluruhan jumlah unit rumah kab/kota dengan jumlah 106.582 unit rumah, berikut koreksi dari Timda:
Tahun 2024 : $1953 / 106.582 \times 100\% = 1,83\%$.
Sehingga dari hasil analisis menunjukkan terjadi kenaikan capaian Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) sebesar 1,44% pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) karena adanya kenaikan jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU pada tahun 2023 sebanyak 417 unit rumah menjadi 1.953 unit rumah pada tahun 2024.

5. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, Dan Perlindungan Masyarakat

- a. Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan tahun 2024 sesuai standar mencapai 100%.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) karena adanya kenaikan jumlah unit rumah yang sedang dibangun terfasilitasi PSU pada tahun 2023 sebanyak 417 unit rumah menjadi 1.953 unit rumah pada tahun 2024
- b. Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 69,23%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 30,77 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Perda dan Perkada yang ditegakkan karena adanya penurunan jumlah keseluruhan Perda dan Perkada yang memuat sanksi pada tahun 2023 sebanyak 13 Perda dan Perkada menjadi 9 Perda dan Perkada pada tahun 2024.
- c. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 150,75%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Perhitungan IKK yang dilakukan pada tahun 2023 tidak sesuai rumus, berikut koreksi dari Timda:
Tahun 2023 : $67.388/44700 \times 100\% = 1,50\%$, Sedangkan pada tahun 2024, nilai yang dimasukkan dengan nilai yang ada pada dokumen berbeda yang seharusnya adalah 23.560, berikut koreksi Timda: Tahun 2024 : $25.617/23.560 \times 100\% = 1,08\%$
Sehingga dari hasil analisis menunjukkan terjadi penurunan capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 0,42% pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana karena adanya penurunan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 44.700 warga negara menjadi 23.560 warga negara pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2023 sebanyak 67.388 warga negara menjadi 25.617 warga negara pada tahun 2024.

- d. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 150,75%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Perhitungan IKK yang dilakukan pada tahun 2023 tidak sesuai rumus, berikut koreksi dari Timda: Tahun 2023 : $67.388/44700 \times 100\% = 1,50\%$, Sedangkan pada tahun 2024, nilai yang dimasukkan dengan nilai yang ada pada dokumen berbeda yang seharusnya adalah 23.560, berikut koreksi Timda: Tahun 2024 : $25.617/23.560 \times 100\% = 1,08\%$, Sehingga dari hasil analisis menunjukkan terjadi penurunan capaian jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana sebesar 0,42% pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana karena adanya penurunan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana yang sesuai target yang ditetapkan pada tahun 2023 sebanyak 44.700 warga negara menjadi 23.560 warga negara pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh penurunan jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana pada tahun 2023 sebanyak 67.388 warga negara menjadi 25.617 warga negara pada tahun 2024.
- e. Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Persentase Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana telah tercapai 100%. Hasil analisis menunjukkan Dokumen pendukung atas data Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana tidak ada. Sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat diuji.
- f. Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 96%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 90,74%
 - 3) Capaian kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran di Kabupaten Bungo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 5,26 persen tahun sebelumnya.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran karena adanya penurunan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 175 kejadian menjadi 54 kejadian pada tahun 2024. Penurunan ini diikuti oleh penurunan Jumlah layanan pemadaman, penyelamatan dan evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten/kota dalam tingkat waktu tanggap oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah ditambah jumlah layanan pemadaman di Kabupaten Bungo dalam tingkat waktu tanggap oleh relawan kebakaran yang dibentuk dan/atau di bawah pembinaan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan/Perangkat Daerah pada tahun 2023 sebanyak 168 kejadian menjadi 49 kejadian pada tahun 2024.
- g. Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 96,05 menit
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 9,5 menit/kejadian
 - 3) Capaian kinerja Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran di Kabupaten Bungo tahun 2024 mengalami penurunan waktu tanggap sebesar 86,55 menit dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran karena adanya penurunan jumlah kejadian kebakaran di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 175 kejadian menjadi 54 kejadian pada tahun 2024.

6. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Sosial

- a. Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 91,44%
 - 3) Capaian kinerja Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) di Kabupaten Bungo tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 8,56 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) di Kabupaten Bungo karena adanya kenaikan populasi penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan

pengemis pada tahun 2023 sebanyak 151 penyandang menjadi 1.227 penyandang pada tahun 2024. Kenaikan ini diikuti oleh kenaikan jumlah penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti pada tahun 2023 sebanyak 151 penyandang menjadi 1.122 penyandang pada tahun 2024.

- b. Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian Kinerja Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten Bungo telah tercapai 100%
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Hasil analisis menunjukkan Dokumen pendukung atas data Jumlah warga negara yang menjadi korban bencana Populasi korban bencana alam dan sosial di daerah Kabupaten Bungo yang membutuhkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah di Kabupaten Bungo tidak ada. Sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat diuji.

1.2.2. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Tenaga Kerja

- a. Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Dokumen pendukung atas Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di Kabupaten Bungo tidak ada sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat diuji nilai capaiannya.
- b. Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 36,617%
 - 2) Capaian Kinerja tahun berkenaan : 0,656%
 - 3) kinerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 35,96 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi tersebut karena adanya penurunan jumlah tenaga keseluruhan pada Kabupaten Bungo yaitu 12.445 pada tahun 2023 menjadi 12.038 tenaga kerja pada tahun 2024. Penurunan jumlah tenaga kerja tersebut diikuti

dengan penurunan jumlah tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi pada tahun 2023 sebanyak 4.557 tenaga kerja dan mengalami penurunan menjadi 79 tenaga kerja pada tahun 2024.

c. Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 115,497%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 117.436,168%
- 3) Perhitungan IKK Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja Tahun 2023 dan 2024 tidak sesuai rumus seharusnya nilai PDRB ADHK tahun berjalan (dalam satuan juta) dibagi dengan jumlah tenaga kerja di tahun bersangkutan, berikut koreksi dari Timda :

Tahun 2023=14.373.700 rupiah / 12.445 x 100% = 1154,97%

Tahun 2024= 14.851.300 rupiah/12.038x 100% =1233,702%

Sehingga dari hasil analisis menunjukkan terjadi kenaikan capaian Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja pada Kabupaten 78,73% pada tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja tersebut karena adanya kenaikan PDRB ADHK pada tahun 2023 sebesar Rp14.373,7 Miliar menjadi Rp14.851,3 Miliar pada tahun 2024. Kenaikan PDRB ADHK tersebut tersebut tidak diikuti dengan penurunan jumlah tenaga kerja di Kabupaten Bungo pada tahun 2023 sebanyak 12.445 tenaga kerja menjadi 12.038 tenaga kerja pada tahun 2024.

d. Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 13,867%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 11,047%
- 3) Capaian kinerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 2,82 persen dari tahun sebelumnya.
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan) tersebut karena adanya penurunan jumlah keseluruhan perusahaan yang terdaftar di Wilayah Kabupaten Bungo yaitu 512 perusahaan pada tahun 2023 menjadi 172 perusahaan pada tahun 2024. Penurunan jumlah perusahaan tersebut diikuti dengan penurunan jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak pada tahun 2023 sebanyak 71 perusahaan dan mengalami penurunan menjadi 19 perusahaan pada tahun 2024

- e. Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 66,481%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 83,117%
 - 3) Capaian kinerja Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,636 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota tersebut karena adanya penurunan jumlah keseluruhan pencari kerja yang terdaftar di Wilayah Kabupaten Bungo yaitu 361 pencari kerja pada tahun 2023 menjadi 154 pencari kerja pada tahun 2024. Penurunan jumlah pencari kerja tersebut diikuti dengan penurunan jumlah (pencari kerja) yang ditempatkan pada tahun 2023 sebanyak 240 pencari kerja dan mengalami penurunan menjadi 124 pencari kerja pada tahun 2024.

2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

- a. Persentase ARG pada belanja langsung APBD
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,047%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0,189%
 - 3) Capaian kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,142 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tersebut karena adanya kenaikan anggaran belanja operasi dan modal APBD pada tahun 2023 yaitu Rp1.285.380.101.609 menjadi Rp1.376.373.016.149. Kenaikan jumlah anggaran belanja operasi dan belanja modal tersebut diikuti dengan jumlah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (ARG) yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD pada Kabupaten Bungo yaitu pada tahun 2023 Rp609.903.960 menjadi Rp2.602.904.300 pada tahun 2024. Pada dokumen pendukung yaitu data Laporan Realisasi APBD Tahun 2024 yang dilampirkan belum dibubuh tanda tangan cap BPKAD Kabupaten Bungo.

- b. Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,047%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0,189%
 - 3) Capaian kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,142 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan Capaian kinerja Persentase ARG pada belanja langsung APBD tersebut karena adanya kenaikan anggaran belanja operasi dan modal APBD pada tahun 2023 yaitu Rp1.285.380.101.609 menjadi Rp1.376.373.016.149. Kenaikan jumlah anggaran belanja operasi dan belanja modal tersebut diikuti dengan jumlah anggaran yang respon terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (ARG) yang ditetapkan pada belanja operasi dan belanja modal APBD pada Kabupaten Bungo yaitu pada tahun 2023 Rp609.903.960 menjadi Rp2.602.904.300 pada tahun 2024.
- c. Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 2,717%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 2,143%
 - 3) Capaian kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,574 dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan capaian kinerja Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan) tersebut karena adanya penurunan jumlah penduduk perempuan pada tahun 2023 yaitu 183.959 orang orang menjadi 186.669 orang. Penurunan jumlah penduduk perempuan tersebut diikuti dengan penurunan jumlah perempuan yang mengalami kekerasan tersebut yaitu pada tahun 2023 sebanyak 5 orang menjadi 4 orang pada tahun 2024.

3. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pangan

- a. Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 114.221,8%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 89,18%
 - 3) Capaian kinerja Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan) tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 114.132,62 persen dari tahun sebelumnya.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan capaian kinerja Persentase ketersediaan pangan tersebut karena adanya kenaikan jumlah Jumlah target cadangan pangan pemerintah kabupaten Bungo yang ditetapkan pada tahun 2023 sangat rendah yaitu 22.46 kg menjadi 31.150 kg pada tahun 2024. Kenaikan jumlah target cadangan pangan tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah cadangan/persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah (CBPK) yaitu pada tahun 2023 sebanyak 25.654.22 kg menjadi 27.779.58 kg pada tahun 2024.

4. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanahan

- a. Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan telah tercapai 100%
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Hasil analisis menunjukkan Dokumen pendukung atas data seluruh luas tanah yang diberikan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) tidak ada. Sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat diuji.
- b. Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0%
 - 3) Capaian kinerja Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum tahun 2024 bernilai 0.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum bernilai 0 dikarenakan berdasarkan Surat Pernyataan No. 050/ 57.1/ DPKP/2025 tanggal 24 Februari 2025 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bungo bahwa tidak ada penetapan tanah untuk fasilitas umum pada tahun 2024, dikarenakan di Kabupaten Bungo tidak ada pembangunan fasilitas umum pada tahun tersebut.
- c. Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian Kinerja Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal telah tercapai 100%.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Hasil analisis menunjukkan Dokumen pendukung atas data Luas tanah di atas Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR) yang diterbitkan tidak ada. Sehingga capaian kinerja tahun 2024 tidak dapat diuji.
- d. Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 62,8%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 68,4%
 - 3) Capaian Kinerja Kenaikan capaian kinerja tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee tahun 2024 sebesar 5,6 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap direistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee tersebut karena adanya penurunan jumlah Jumlah penerima tanah obyek landreform sebanyak 500 orang pada tahun 2023 menjadi 250 orang pada tahun 2024. Penurunan jumlah penerima penerima tanah obyek landreform tersebut diikuti dengan penurunan jumlah penerima tanah obyek landreform dengan luasan yang diterima lebih besar sama dengan 0.5 ha sebanyak 314 orang pada tahun 2023 menjadi 171 orang pada tahun 2024.
- e. Tersedianya tanah untuk masyarakat
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 65,41%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Tersedianya tanah untuk masyarakat tahun 2024 sebesar 34,59 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja Tersedianya tanah untuk masyarakat tersebut karena adanya penurunan Luas Izin Membuka Tanah yang diterbitkan pada tahun 2023 yaitu sebesar 297.244 ha menjadi 1.034.737.9 m² pada tahun 2024. Penurunan luas izin membuka tanah tersebut diikuti dengan penurunan luas tanah yang telah dimanfaatkan berdasarkan izin membuka tanah yaitu sebesar 194.456 ha pada tahun 2023 menjadi 1.034.737.9 m² pada tahun 2024.
- f. Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 69,23%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%

- 3) Capaian kinerja Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi tahun 2024 meningkat sebesar 30,77 persen dari tahun sebelumnya.
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja Tersedianya tanah untuk masyarakat tersebut karena adanya penurunan Jumlah pengaduan sengketa tanah garapan pada tahun 2023 yaitu sebanyak 9 pengaduan menjadi 4 pengaduan pada tahun 2024. Penurunan jumlah pengaduan tersebut diikuti dengan jumlah sengketa tanah garapan yang ditangani yaitu 9 pengaduan pada tahun 2023 menjadi 4 pengaduan pada tahun 2024.

5. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Lingkungan Hidup

- a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 68,67
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 70,37
 - 3) Capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 1,7 dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kabupaten Bungo karena adanya kenaikan jumlah Indeks Kualitas Udara (IKU) sebesar 90,91 pada tahun 2023 menjadi 93,39 pada tahun 2024. Kenaikan jumlah Indeks Kualitas Udara (IKU) diikuti juga kenaikan Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebanyak 42,43 pada tahun 2023 menjadi 45,74 pada tahun 2024.
- b. Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 41,595%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 77,386%
 - 3) Kenaikan capaian kinerja Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 35,791% dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Bungo karena adanya kenaikan jumlah total volume sampah sebesar 460,18 pada tahun 2023 menjadi 42.524,49 pada tahun 2024. Kenaikan capaian kinerja Terlaksananya pengelolaan sampah diikuti juga kenaikan Jumlah seluruh total volume timbunan sampah sebanyak 1.120,75 pada tahun 2023 menjadi 54.951,48 pada tahun 2024.

- c. Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 8%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 8%
 - 3) Capaian kinerja tahun 2024 dibanding tahun sebelumnya tidak mengalami peningkatan maupun penurunan atau bersifat konstan.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 bersifat konstan karena jumlah usaha dan/atau kegiatan dilakukan pemeriksaan sebanyak 25 usaha dan di tahun 2024 tidak mengalami perubahan karena jumlah usaha yang melanggar izin lingkungan dan izin PPLH yang diterbitkan Kabupaten Bungo berjumlah 2 perusahaan pada tahun 2023 dan 2024.

6. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- a. Perekaman KTP elektronik
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 98,04 %
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 99,83%
 - 3) Capaian kinerja Perekaman KTP Elektronik mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar 1,79 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja Perekaman KTP Elektronik Kabupaten Bungo dikarenakan adanya kenaikan jumlah penduduk berumur 17 tahun ke atas yang memiliki KTP yaitu pada tahun 2023 sebanyak 259.472 penduduk menjadi 262.733 penduduk pada tahun 2024.
- b. Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 41,32%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 47,71%
 - 3) Capaian kinerja Persentase anak usia 01-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA mengalami peningkatan sebesar 6,39 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA dikarenakan adanya kenaikan jumlah anak usia 0-17 tahun yaitu pada tahun 2023 sebanyak 113.724 anak menjadi 114.573 anak pada tahun 2024. Kenaikan jumlah anak usia 0-17 tahun tersebut diikuti dengan kenaikan jumlah anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang sudah memiliki KIA yaitu sebanyak 47.000 anak pada tahun 2023 dan 54.664 anak pada tahun 2024.

- c. Kepemilikan akta kelahiran
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 96,75%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 97,38%
 - 3) Capaian kinerja Kepemilikan akta kelahiran mengalami kenaikan sebesar 0,63 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kenaikan capaian kinerja kepemilikan akta dikarenakan adanya kenaikan jumlah anak usia 0-18 tahun yang sudah memiliki akta lahir yaitu pada tahun 2023 sebanyak 113.432 anak menjadi 113.028 anak pada tahun 2024.
- d. Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 66,67%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 25,93%
 - 3) Capaian Jumlah Perangkat Daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama mengalami penurunan sebesar 40,74 persen dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan capaian kinerja jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama dikarenakan adanya penurunan jumlah perangkat daerah yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama yaitu pada tahun 2023 sebanyak 18 perangkat daerah menjadi 7 perangkat daerah pada tahun 2024.
Data penyebut yaitu Jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Bungo pada tahun 2024 yaitu 27 Perangkat Daerah tidak ada.

7. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

- a. Persentase pengentasan desa tertinggal
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 60%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 50%
 - 3) Capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengalami penurunan sebesar 10% dari tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan tren positif.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan capaian kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dikarenanya adanya penurunan jumlah desa tertinggal yang memenuhi kriteria desa berkembang pada tahun 2023 berjumlah 3 desa menjadi 1 desa pada tahun 2024 dan jumlah desa tertinggal per awal tahun pada tahun 2023 berjumlah 5 desa turun menjadi 2 desa pada tahun 2024.

- b. Persentase peningkatan status desa mandiri
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 9,756%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 8,108%
 - 3) Capaian kinerja Persentase peningkatan status desa mandiri mengalami penurunan sebesar 1,648% dari tahun sebelumnya..
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan capaian kinerja Persentase peningkatan status desa mandiri karena terjadi pengurangan desa berkembang yang memenuhi kriteria desa mandiri per tahun berdasarkan indeks desa membangun per tahun dari 8 desa pada tahun 2023 menjadi 6 desa pada tahun 2024 dan jumlah desa berkembang per awal tahun dari 82 desa pada tahun 2023 menjadi 74 desa pada tahun 2024 di Kabupaten Bungo.

8. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengendalian penduduk dan keluarga berencana

- a. TFR (Angka Kelahiran Total)
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 2,23
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 2,23
 - 3) Capaian kinerja TFR (Angka Kelahiran Total) tidak mengalami mengalami peningkatan maupun penurunan.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja TFR (Angka Kelahiran Total) tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan yaitu 2,23 pada tahun 2023 dan 2024.
Dokumen Rincian perhitungan angka kelahiran total (TFR) tidak ada.
- b. Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 73,902%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 73,613%
 - 3) Capaian kinerja Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) mengalami penurunan sebesar 0,289% dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> penurunan Capaian kinerja Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR) karena jumlah peserta KB aktif modern bertambah hanya 85 orang, sementara jumlah pasangan usia subur bertambah 379 orang.
- c. Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 10,087%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 7,875%
 - 3) Capaian kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) mengalami penurunan sebesar 2,212% dari tahun sebelumnya.

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> perubahan Capaian kinerja Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need) karena jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani menurun dari 6.751 tahun 2023 menjadi 5.300 tahun 2024.

9. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perhubungan

- a. Rasio konektivitas kabupaten/kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,46
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0,50
 - 3) Capaian kinerja Rasio konektivitas kabupaten/kota mengalami peningkatan sebesar 0,04% dari tahun sebelumnya, capaian ini masih tergolong rendah.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Rasio konektivitas Kabupaten Bungo mengalami peningkatan dari 0,46 tahun 2023 menjadi 0,50 tahun 2024, hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas.
- b. Kinerja lalu lintas kabupaten/kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,25
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0,45
 - 3) Capaian Kinerja Indikator Kinerja lalu lintas kabupaten/kota mengalami kenaikan sebesar 0,20% dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan Capaian kinerja lalu lintas kabupaten/kota sebesar 0,20%, hal ini menunjukkan adanya perbaikan pengelolaan dan pengendalian lalu lintas.

10. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Komunikasi dan Informatika

- a. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 71,11%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 71,11%
 - 3) Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah (PD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dari tahun 2023 dan tahun 2024 masih sama yaitu Jumlah PD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo sejumlah **32** dari seluruh perangkat daerah berjumlah 45, namun masih terdapat 13 PD yang belum terhubung dengan akses internet, dikarenakan infrastruktur jaringan belum merata di daerah terpencil dan pembiayaan dari Kominfo belum disediakan.

- b. Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 72,727%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 72,727%
 - 3) Capaian Kinerja Indikator Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi tidak mengalami peningkatan ataupun menurunan.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Jumlah Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi pada tahun 2023 dan 2024 tidak mengalami perubahan yaitu berjumlah 32 dari seluruh layanan publik berjumlah 44.
- c. Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 68,920%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 17,018%
 - 3) Capaian kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengalami penurunan 51,902% dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota karena munurunnya jumlah masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi public, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah turun 257.475 masyarakat pada tahun 2023 menjadi 43.863 pada tahun 2024.

11. Kinerja Penyelenggaraan Urusan koperasi, usaha kecil dan menengah

- a. Meningkatnya Koperasi yang berkualitas
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 31,77%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 18,75%
 - 3) Capaian kinerja Meningkatnya Koperasi yang berkualitas mengalami penurunan sebesar 13,02 % dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Meningkatnya Koperasi yang berkualitas karena menurunnya jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya berdasarkan berdasarkan RAT, volume usaha dan aset dari 61 koperasi tahun 2023 menjadi 31 koperasi tahun 2024 dari jumlah seluruh koperasi aktif sebanyak 192 koperasi

- b. Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 16,060%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 5,288%
 - 3) Capaian kinerja Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha mengalami penurunan sebesar 10,772% dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha mengalami karena masih terdapat 3.887 usaha mikro yang belum menjadi wirausaha dari 4.104 usaha kecil keseluruhan di Kabupaten Bungo tahun 2024

12. Kinerja Penyelenggaraan Urusan penanaman modal

- a. Persentase peningkatan investasi di kabupaten/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : -15.512%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : -38.058%
 - 3) Capaian kinerja Persentase peningkatan investasi di kabupaten Bungo mengalami penurunan sebesar 22,547% dari tahun sebelumnya,
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase peningkatan investasi di kabupaten Bungo di sebabkan pada tahun 2024 ada beberapa Perusahaan yang melakukan perbaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal serta ada beberapa Perusahaan yang tidak ada tambahan realisasi pada saat pelaporan Kegiatan Penanaman Modal baik itu Triwulan I ataupun triwulan lainnya , selain itu ada beberapa perusahaan yang melapor namun tidak ada penambahan realisasi investasi, sehingga nilai realisasi investasi hanya sebesar Rp. 683.608.972.267.selanjutnya Pada tahun 2023 nilai realisasi investasi sebesar Rp. 1.103.640.397.142 ini di sebabkan dari adanya penambahan modal investasi Oleh perusahaan setiap triwulannya.

13. Kinerja Penyelenggaraan Urusan kepemudaan dan olahraga

- a. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,278%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0,218%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri mengalami penurunan sebesar 0,06% dari tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri, karena masih terdapat 92.487 pemuda usia (16-30) tahun yang belum berwirausaha di kabupaten Bungo dari 92.689 pemuda usia (16-30) di Kabupaten Bungo tahun 2024

- b. Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,283%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0,265%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan mengalami penurunan sebesar 0,018% dari tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan karena Jumlah pemuda (16-30 tahun) yg menjadi anggota aktif pada organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan tahun 2023 dan tahun 2024 berjumlah 246, sementara Jumlah pemuda (umur 16-30tahun) di Kabupaten Bungo mengalami peningkatan tahun 2023 berjumlah 86.880 pemuda menjadi 92.689 pemuda pada tahun 2024.
- c. Peningkatan prestasi olahraga
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 6 Medali
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 6 Medali
 - 3) Capaian kinerja Peningkatan prestasi olahraga tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian Kinerja Indikator Peningkatan prestasi olahraga pada Kabupaten Bungo tidak mengalami penurunan ataupun peningkatan jumlah perolehan medali pada event olahraga nasional dan internasional pada tahun 2023 dan 2024 masih sama mendapat 6 medali, hal ini dikarenakan belum optimalnya upaya meningkatkan prestasi atlit.

14. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Statistik

- a. Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah pada tahun 2024 adalah 100%
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> terdapat kekeliruan dalam penginputan data yaitu Jumlah seluruh PD di Kabupaten Bungo tahun 2023 sebanyak 45 PD, sementara pada tahun 2024 sebanyak 28 PD,
- b. Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%

- 3) Capaian kinerja IKK Persentase PD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah tahun 2024 adalah 100%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> terdapat kekeliruan dalam penginputan data yaitu Jumlah seluruh PD di Kabupaten Bungo tahun 2023 sebanyak 45 PD, sementara pada tahun 2024 sebanyak 28 PD,

15. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Persandian

- a. Tingkat keamanan informasi pemerintah
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0%
 - 3) Capaian kinerja Tingkat keamanan informasi pemerintah tahun 2024 sebesar 0%
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bungo menyatakan Kegiatan Strategis yang telah diamankan melalui kegiatan pengamanan sinyal dibanding banyaknya jumlah kegiatan strategis yang harus diamankan masih belum terlaksana karena : kurangnya Sumber Daya Manusia dalam pengelolaan kegiatan, Infrastruktur belum memadai dan keterbatasan anggaran keterbatasan anggaran

16. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kebudayaan

- a. Terlestarikannya Cagar Budaya
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 17,857%%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100%
 - 3) Capaian kinerja Terlestarikannya Cagar Budaya tahun 2024 adalah mengalami peningkatan sebesar 82,243%
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian Kinerja Indikator Terlestarikannya Cagar Budaya tahun 2024 adalah 100% karena jumlah cagar budaya yang dilestarikan dan jumlah cagar budaya yang terdata sama 6 cagar budaya, sementara tahun 2023 jumlah cagar budaya yang dilestarikan sebanyak 5 cagar budaya dari 28 cagar budaya yang terdata pada Kabupaten Bungo.

17. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

- a. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 54,1 %
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 61,028%
 - 3) Capaian kinerja Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat mengalami peningkatan sebesar 6,928% dari tahun sebelumnya

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat sebesar 62,028 terdiri atas aktivitas membaca sebagai berikut : Frekuensi membaca senilai 60,18, Durasi membaca senilai 55,23, Jumlah bahan bacaan senilai 59,09, Frekwensi akses internet senilai 70,26 dan Durasi akses internet senilai 60,38; ,e menunjukkan tren positif dalam kegemaran membaca.
- b. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 55,63%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 59,98%%
 - 3) Capaian kinerja Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 4,35 % dari tahun sebelumnya.
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat sebesar 59,98 terdiri atas sebagai berikut :
 - UPLM 1 = Pemerataan layanan Perpustakaan senilai 0,2798
 - UPLM 2 = Ketercukupan Koleksi senilai 0,3976
 - UPLM 3 = Ketercukupan Tenaga Perpustakaan senilai 0,332
 - UPLM 4 = Tingkat Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaan senilai 0,7398
 - UPLM 5 = Perpustakaan ber-SNP senilai 0,4491
 - UPLM 6 = Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan perpustakaan senilai 10.000
 - UPLM 7 = Anggota Perpustakaan senilai 10.000

18. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kearsipan

- a. Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009)
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 32,53
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 32,53
 - 3) Capaian kinerja Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Ps40 dan 59 U 43/2009) tahun 2023 dan 2024 tetap sama 32,53
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian Kinerja Indikator Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional menunjukkan tahun 2023 dan tahun 2024 tetap sama 32,53 hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan karsipan daerah belum menjadi prioritas.
- b. Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 37,5 %
- 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 37,5%
- 3) Capaian kinerja IKK Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tahun 2024 tetap sama tahun 2023 dan 2024 yaitu 37,5%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian Kinerja Indikator Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat tidak mengalami peningkatan ataupun penurunan tetap sama tahun 2023 dan 2024 yaitu 37,5%, hal ini menunjukkan bahwa program kearsipan belum berjalan optimal.

1.2.3. Urusan Pilihan

1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Keluatan dan Perikanan

- a. Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 97,508%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 101.084%
 - 3) Capaian kinerja Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten/Kota mengalami peningkatan sebesar 3,577% dari tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan Capaian Jumlah total produksi perikanan (Tangkap dan Budidaya) Kabupaten Bungo Tahun 2024 tersebut dikarenakan jumlah total produksi perikanan sebesar 1707 Ton melebihi target produksi perikanan yang ditetapkan sebesar 1688,7 Ton.

2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pariwisata

- a. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan
 - 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 0
 - 3) Capaian kinerja Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan tahun 2023 dan 2024 adalah 0
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Tahun 2023 tidak ada Wisatawan mancanegara yang berkunjung di Kabupaten Bungo, Tahun 2024 Jumlah wisatawan yang berkunjung sebanyak 27 orang

- b. Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten/Kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 28,73%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 80,89%
 - 3) Capaian kinerja Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bungo mengalami peningkatan sebesar 52,16% dari tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan Capaian Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke Kabupaten Bungo Tahun 2024 tersebut dikarenakan jumlah wisatawan yang berlibur pada tahun 2024 sebanyak 1.422.174 orang lebih banyak dari Tahun 2023 sebanyak 786.208 orang.
- c. Tingkat hunian akomodasi
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 27,534%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 22,987%
 - 3) Capaian kinerja Persentase tingkat hunian akomodasi mengalami penurunan sebesar 4,546% dari tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian tingkat hunian akomodasi Tahun 2024 tersebut dikarenakan jumlah kamar yang terjual pada tahun 2024 sebesar 54.046 kamar lebih kecil dari Tahun 2023 sebanyak 64.321 kamar.
Data dukung jumlah kamar yang tersedia tidak ada, sehingga tidak dapat diuji nilai capaianya.
- d. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 2,580%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 2,529 %
 - 3) Capaian kinerja Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku mengalami penurunan sebesar 0,051% dari tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku Tahun 2024 jumlah kontribusi sektor pariwisata pada PDRB pada tahun 2024 sebesar 691.914,61 dari total PDRB berlaku sebesar 27.356.372,61.
- e. Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0,005%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 4,118%
 - 3) Capaian kinerja kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD mengalami peningkatan sebesar 4,113% dari tahun sebelumnya

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan Capaian kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD Tahun 2024 tersebut dikarenakan total realisasi PAD dari sektor pariwisata pada tahun 2024 sebesar Rp6,902.374.312 lebih besar dari total realisasi PAD dari sektor pariwisata Tahun 2023 yaitu sebesar Rp9.189.000

3. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pertanian

- a. Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun produktivitas pertanian per tahun
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 564,264%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 582.093%
 - 3) Capaian kinerja Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun produktivitas pertanian per tahun mengalami peningkatan sebesar 17,829% dari tahun sebelumnya
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian Persentase produktivitas pertanian per hektar per tahun produktivitas pertanian per tahun meningkat namun Jumlah produksi pertanian pangan perhektar pertahun dan luas panen menurun.
- b. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular persentase kasus zoonosis kab/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : -100%
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 0%
 - 3) Capaian kinerja Persentase kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular persentase kasus zoonosis kab/kota mengalami peningkatan sebesar 0%
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Pada Tahun 2023 dan 2024 pada Kabupaten Bungo tidak ada kejadian dan kasus penyakit hewan menular.
4. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kehutanan
Bukan merupakan urusan Kabupaten/Kota.

1.3. Uraian Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Urusan Pemerintahan

1.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Tidak Berkaitan Pelayanan Dasar

1.3.2. Urusan Pilihan

- 1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral**
- a. Capaian kinerja tahun lalu : 0
 - b. Capaian kinerja tahun berkenaan : 0
 - c. Laju capaian kinerja (peningkatan/penurunan) : 0
 - d. Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemedagri.go.id/> Pada tahun 2024 tidak ada perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki izin (Surat Pernyataan Setda Kabupaten Bungo)

2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perdagangan

- a. Pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan)
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100 %
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 72,611 %
 - 3) Capaian kinerja pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) mengalami penurunan sebesar 27,389%
 - 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemedagri.go.id/>, Penurunan capaian kinerja pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan) dikarenakan dikarenakan data pembanding/penyebut Keseluruhan jumlah pelaku usaha di wilayah Kabupaten Bungo tahun 2023 tidak ada.

b. Kinerja realisasi pupuk

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 83.74687 %
- 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 47,89 %
- 3) Capaian kinerja Realisasi pupuk mengalami penurunan persentase sebesar 35,85% dari tahun sebelumnya.
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemedagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja realisasi pupuk tersebut dikarenakan jumlah pupuk bersubsidi yang disalurkan kepada kelompok tani/perorangan petani. yang menurun dari tahun 2024 sebesar 4.253.338 Ton sedangkan pada tahun 2023 sebesar 7358 Ton

c. Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 50,23 %
- 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 48,529%
- 3) Capaian kinerja Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkap annya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku mengalami penurunan sebesar 1,71%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemedagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku dikarenakan tahun 2024 jumlah UTTP bertanda tera sah yang berlaku sebesar 462 sedangkan tahun 2023 sebesar 433.

7. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perindustrian

- a. Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota
- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 2,880 %
 - 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 5,898 %

- 3) Capaian kinerja Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota mengalami peningkatan sebesar 3,08%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemedagri.go.id/> Peningkatan Capaian kinerja Persentase Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di kab/kota dikarenakan adanya penambahan Jumlah IKM pada tahun 2024 sejumlah 158 IKM dari total IKM sebanyak 2837, sedangkan tahun 2023 penambahan IKM sebanyak 75 dari total IKM 2679.

b. Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0 %
- 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 100 %
- 3) Capaian kinerja Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIK mengalami peningkatan sebesar 100%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemedagri.go.id/> Pada Tahun 2024 berdasarkan surat pernyataan Plt. Kepala Dinas Koperasi, UKM, Perindag Kabupaten Bungi untuk persentase pencapaian Sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam (RIPIN) yang ditetapkan dalam RPIK di Kabupaten Bungo masih dalam tahap proses penyusunan dan penyelesaian RPIK Kabupaten Bungo

c. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 7,048%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenaan : 4,406%
- 3) Capaian kinerja Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait mengalami penurunan sebesar 2,642%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Capaian kinerja Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha industri (IUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan instansi terkait menunjukkan hanya 4,46% kegiatan yang berizin telah dipantau dan diawasi dibandingkan dengan tahun 2023 7,048%

d. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 0%
- 3) Capaian kinerja Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin perluasan industri (IPUI) kecil dan industri menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait sebesar 0%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Hal ini disebabkan Kabupaten Bungo tidak mengeluarkan izin perluasan industri (IPUI) industri besar pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Bungo.

e. Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 0%
- 3) Capaian kinerja Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) yang lokasinya di daerah kab/kota sebesar 0%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Hal ini disebabkan tidak mengeluarkan izin usaha kawasan industri (IUKI) dan izin perluasan kawasan industri (IPKI) pada tahun 2023 dan 2024 berdasarkan surat pernyataan Kepala Dinas Koperasi, UKM dan Perindag Kabupaten Bungo.

f. Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 100%
- 3) Capaian kinerja Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini tahun 2023 dan 2024 sebesar 100%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Capaian kinerja Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini dikarenakan Pemerintah Kabupaten Bungo telah menyajikan informasi industri dan kelengkapan informasi industri secara lengkap.

g. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transmigrasi

Bukan kewenangan Kabupaten/Kota.

1.3.3. Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Perencanaan dan Keuangan

a. Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 25,689%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 23,172%
- 3) Capaian kinerja Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan mengalami penurunan sebesar 2,5172% dari tahun sebelumnya
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Rasio belanja pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan tersebut dikarenakan kenaikan jumlah APBD Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebesar Rp1.429.241.532.892,00 dari Tahun 2023 sebesar Rp1.304.258.425.075,00 sedangkan Jumlah belanja pegawai di luar guru dan tenaga Kesehatan mengalami penurunan dari tahun 2023 sebesar Rp335.047.925.346,00 tahun 2024 sebesar Rp331.179.905,665,00

b. Rasio PAD

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 13,403%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 12,63%
- 3) Capaian kinerja Rasio PAD mengalami penurunan sebesar dari 0,773 % tahun sebelumnya
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Rasio PAD tersebut dikarenakan penurunan jumlah realisasi PAD Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebesar Rp167.612.297.682,75 dari Tahun 2023 sebesar Rp169.677.567.056,05.

c. Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 3,155
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 3,158
- 3) Capaian Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) mengalami peningkatan sebesar 0,003 dari tahun sebelumnya
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan nilai Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tersebut dikarenakan Pemerintah kabupaten Bungo telah mampu mendefinisikan kinerja dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya telah relevan dan terintegrasi namun pengendalian yang dibangun dan dikembangkan masih terdapat kelemahan/belum efektif dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketercapaian tujuannya.

d. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP)

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 3,090
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 3,00

- 3) Capaian Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) mengalami penurunan sebesar 0,09 dari tahun sebelumnya
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Bungo telah mencapai Level 3 dengan skor 3,00. Hasil tersebut menunjukkan komitmen dalam meningkatkan kualitas pengawasan internal yang diharapkan dapat berkontribusi dalam perbaikan kinerja, tata kelola, risiko dan pengendalian pada Pemerintah Kabupaten Bungo.

e. Rasio belanja urusan pemerintah umum (dikurangi transfer expenditures)

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 69,018%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 93,21%
- 3) Capaian kinerja Rasio belanja urusan pemerintah umum (dikurangi transfer expenditures) mengalami peningkatan sebesar 24,03% dari tahun sebelumnya
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan Rasio belanja urusan pemerintah umum (dikurangi transfer expenditures) tersebut dikarenakan kenaikan jumlah belanja APBD Kabupaten Bungo Tahun 2024 sebesar Rp1.332.199.272.003,79 dari Tahun 2023 sebesar Rp 900.173.996.562,00

f. Opini Laporan Keuangan

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : WTP
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : WTP
- 3) Opini Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo Tahun 2024 dan Tahun 2023 adalah Wajar Tanpa Pengecualian
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Hasil pemeriksaan BPK ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bungo dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, efektivitas sistem pengendalian intern, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pengadaan

a. Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 0%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 0%
- 3) Capaian kinerja Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya yang ditandatangani pada kuartal pertama adalah sebesar 0%

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Hal ini disebabkan Tahun Anggaran 2023 dan 2024 Pemerintah Kabupaten Bungo tidak melaksanakan proyek nilai pagunya diatas 50 M yang ditandatangani pada triwulan pertama (Januari-Maret)

b. Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 48,843%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 43,531%
- 3) Capaian kinerja Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif mengalami penurunan sebesar 5,312%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif dikarenakan jumlah paket pengadaan yang dilakukan dengan metode pemilihan penyedia barang/jasa secara kompetitif merupakan nilai kontrak, Format data dukung penyebut dan pembilang tidak sesuai pedoman umum penyusunan LPPD.

c. Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 22,100%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 43,09%
- 3) Capaian kinerja Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan mengalami peningkatan sebesar 20,99%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan disebabkan Jumlah nilai belanja operasi dan modal yang melalui pengadaan mengalami kenaikan pada tahun 2024 sebesar Rp593.084.026.788,00 dari tahun 2023 sebesar 264.520.855.377,74

d. Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 301,06%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 42,62%
- 3) Capaian kinerja Persentase peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi pada pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah daerah mengalami penurunan sebesar 258,44%

3. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Kepegawaian

a. Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 71,034%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 71,706%

- 3) Capaian kinerja Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mengalami peningkatan sebesar 0,672%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada Tahun 2024 dikarenakan banyaknya ASN yang sudah menyelesaikan pendidikan seperti Diploma, Sarjana, Pasca Sarjana dan Doktoral pada perguruan tinggi negeri dan atau swasta yaitu sebanyak 1181 pegawai dari jumlah seluruh pegawai sebanyak 1.647 pegawai.

b. Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 20,524%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 19,611%
- 3) Capaian kinerja Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mengalami penurunan sebesar 0,913%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Rasio pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada Tahun 2024 sebanyak 323 pegawai fungsional dari seluruh jumlah pegawai pemerintah sebanyak 1.647 pegawai, sementara pada tahun 2023 pegawai fungsional 360 dari seluruh pegawai 1754.

c. Rasio jabatan fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 46,666%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 36,842%
- 3) Capaian kinerja Rasio jabatan fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) mengalami peningkatan sebesar 9,824%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan Rasio jabatan fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) pada Tahun 2024 sebanyak 119 orang pegawai yang memiliki sertifikat kompetensi dan tahun 2023 sebanyak 168 orang

4. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Manajemen Keuangan

a. Budget excetucion: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 14,910%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 11,030%
- 3) Capaian kinerja Budget excetucion: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD mengalami penurunan sebesar 3,88%

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan kinerja Budget excetusion: Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD Tahun 2024 dikarenakan Nilai realisasi belanja daerah dalam APBD tahun pelaporan yang merupakan kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan sebesar Rp1.429.241.532.892,88 dari total belanja APBD sebesar Rp1.606.437.931.854,75. Sedangkan pada tahun 2023 realisasi belanja sebesar Rp1.304.258.427.075,20 dari total belanja APBD sebesar Rp1.532.814.937.889,00

b. Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 2,8983%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 12,1756%
- 3) Capaian kinerja Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD mengalami peningkatan sebesar 9,2773%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Peningkatan kinerja Revenue mobilization: Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran dalam APBD Tahun 2024 dikarenakan total PAD dalam APBD yang mengalami kenaikan sebesar Rp190.849.447.772,79 dari tahun 2023 sebesar Rp174.742.119.916,00

c. Manajemen aset

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 4
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 4
- 3) Capaian kinerja Manajemen aset Tahun 2023 dan 2024 adalah 4
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Kinerja manajemen aset pemerintah Kabupaten Bungo pada Tahun 2023 dan 2024 telah menyajikan daftar asset tetap, manual untuk menyusun daftar asset tetap, proses inventarisasi asset tahunan dan nilai asset tercantum dalam laporan anggaran.

d. Cash management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 14,511%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 1,959%
- 3) Capaian kinerja Cash management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 12,552%

- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Penurunan kinerja Cash management: Rasio anggaran sisa terhadap total belanja dalam APBD tahun sebelumnya pada tahun 2024 nilai SILPA sebesar Rp22.971.590.212,76 dari total belanja anggaran Tahun 2023 sebesar Rp1.172.473.176.394,8

5. Kinerja Penyelenggaraan Urusan Transparasi dan Partisipasi Publik

a. **Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units)**

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 97.722%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 96,456%
- 3) Capaian kinerja Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) mengalami penurunan sebesar 1,266%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources available to frontline service delivery units) pada Tahun 2024 tidak ada.

b. **Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public acces to fiscal information)**

- 1) Capaian kinerja tahun lalu : 100%
- 2) Capaian kinerja tahun berkenan : 100%
- 3) Capaian kinerja Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public acces to fiscal information) pada Tahun 2023 dan 2024 adalah 100%
- 4) Berdasarkan data yang disajikan pada <https://elppd.kemendagri.go.id/> Akses publik terhadap informasi keuangan daerah (Public acces to fiscal information) yang dipublikasi di website Pemda pada Tahun 2024 yaitu Ranperda APBD 2024, Perda APBD 2024, Ranperda Perubahan APBD 2024, Perda Perubahan APBD 2024, Ringkasan RKA SKPD APBD 2024, Ringkasan DPA SKPD APBD 2024, LRA SKPD 2024, LKPD yang sudah diaudit dan opini atas LKPD yang dapat diakses pada <https://bungokab.go.id/>

BAB III

PENUTUP

3.1 Saran dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Kabupaten Bungo tahun 2025 atas LPPD Kabupaten Bungo tahun 2024 dapat direkomendasikan hal-hal sebagai berikut :

1. Terkait Perbaikan data dan indikator kinerja
 - a. Agar memastikan data yang disampaikan akurat dan terverifikasi (sinkron dengan data PD teknis, BPS atau Pusat)
 - b. Agar meningkatkan kualitas indikator kinerja, tidak sekedar capaian numerik tapi juga memiliki manfaat untuk masyarakat (*outcome oriented*)
2. Terkait Koordinasi antar PD
 - a. Membentuk tim lintas PD agar penyusunan LPPD dan Evaluasinya tidak hanya menjadi tanggung jawab Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Bungo
 - b. Melakukan rapat koordinasi berkala dalam rangka menyamakan persepsi terhadap instrument EPPD
3. Terkait Analisis capaian dan permasalahan
 - a. Pada analisis capaian dan permasalahan tambahkan juga analisis penyebab, hambatan, dan solusi atas target yang belum tercapai.
 - b. Menyajikan perbandingan antar tahun atau dengan target RPJMD
4. Agar menggunakan hasil EPPD sebagai bahan evaluasi RPJMD dan RKPD karena EPPD bukan hanya formalitas tapi alat untuk memperbaiki kebijakan, pelayanan, dan penganggaran.

3.2 Kesimpulan

Berdasarkan evaluasi atas Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten Bungo, dapat disimpulkan Pemerintah Kabupaten Bungo, dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan Pemerintah Kabupaten Bungo telah menjalankan urusan pemerintahan secara umum cukup memadai, hal ini terlihat dari adanya peningkatan capaian beberapa IKK Outcome dari Tahun sebelumnya,

Hasil Evaluasi diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih baik dimasa yang akan datang dan sebagai bahan informasi untuk perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan, Evaluasi yang berkelanjutan tentunya tetap harus dilakukan guna menciptakan siklus perbaikan yang terus menerus, yang pada akhirnya akan menghasilkan tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif dan berdaya saing dalam mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Laporan ini disusun sebagai bagian darin upaya peningkatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil.

